

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN
KAWASAN GEOPARK
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam
Pengembangan Kawasan Pariwisata *Geopark Ciletuh* 2019)**

Shafira Mediana Putri¹, Nandang Alamsyah Deliarnoor², Heru Nurasa³

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: firmadiana.21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark, yaitu Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh UNESCO yang menetapkan Kawasan Geopark Ciletuh sebagai Global Geopark dimana hal tersebut dapat menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung, oleh karena itu pemerintah daerah melakukan pengembangan wisata daerah ciletuh dengan prinsip konservasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi, sehingga dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Metode penulisan jurnal ini melalui studi literatur melalui berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 dalam pengembangan Ciletuh dilihat dari 6 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu dimensi : Ukuran/Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Geopark Ciletuh*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman berupa letak geografis strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, geologi, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah,

seni, dan budaya yang merupakan sumber daya dan modal dalam sektor kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan fungsi pariwisata untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan, yaitu: (a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b). meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c). menghapus kemiskinan; (d). mengatasi pengangguran; (e). melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; (f) memajukan kebudayaan; (g) mengangkat citra bangsa; (h) memupuk rasa cinta tanah air; (i) memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa; dan (j) mempererat persahabatan antar bangsa.

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata di kawasan strategis pariwisata. Selain itu, aspek yang diatur dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Membangun destinasi pariwisata berkelas dunia adalah destinasi yang memenuhi standar internasional Global

Sustainable Tourism Council (GSTC) dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial/masyarakat, dan ekonomi.

Destinasi pariwisata tersebut, memiliki magnet menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung; yang menyuguhkan keragaman jenis wisata mulai dari alam yang terawat, atraksi budaya yang khas, kuliner, dan yang tidak kalah penting adanya kemudahan fasilitas dan aksesibilitas ke destinasi tersebut, sehingga tingkat keluhan wisatawan rendah.

Dalam rangka mengembangkan destinasi pariwisata berkelas dunia yang mengintegrasikan kekayaan potensi pariwisata daerah yang khas dan berdaya saing global, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu upaya dilakukan diantaranya mengembangkan konsepsi dan potensi Geopark, yakni sebuah konsep manajemen pengembangan berkelanjutan yang menyerasikan keragaman geologi (geodiversity), hayati (biodiversity), dan budaya (cultural diversity) melalui prinsip konservasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ada.

Geopark adalah wilayah geografis yang memiliki situs warisan geologi terkemuka dan bagian dari konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Geopark tidak hanya mencakup situs geologi, tetapi memiliki batas geografis yang jelas

serta sinergitas antara keragaman geologi, hayati, dan budaya yang ada di dalam kawasan tersebut. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Status geopark yang sudah diakui secara Internasional adalah Ciletuh Palabuhanratu dengan nama Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CP UGG), sedangkan 4 zona kawasan geopark lainnya masuk dalam kategori usulan (aspiring) ke tingkat nasional.

Pada awalnya Geopark Ciletuh Palabuhanratu ditetapkan sebagai geopark nasional pada tanggal 22 Desember 2015 dengan kawasannya meliputi Kecamatan Ciemas di bagian utara dan Kecamatan Ciracap di bagian selatan. Dalam rangka “Advisory Mission”, kawasan geopark Ciletuh Palabuhanratu disarankan untuk memperluas kawasan ke arah utara dan barat menjadi 8 (delapan) kecamatan, apabila statusnya menjadi geopark nasional dan global.

Untuk mewujudkan potensi geopark secara umum di Jawa Barat, dan khususnya pada pilot project Geopark Ciletuh Palabuhanratu sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia (world class tourism), tentunya perlu dukungan infrastruktur, fasilitas, regulasi, kebijakan pemerintah dan program pemberdayaan masyarakat. Geopark memiliki semboyan: “Memuliakan Bumi, Mensejahterakan Masyarakat (“Celebrating Earth Heritage, Sustaining Local Communities”). Pembangunan dan

penumbuhan perekonomian berkelanjutan pada kawasan geopark dikembangkan melalui paket pariwisata seperti: geowisata, wisata bahari, wisata petualangan, wisata budaya, wisata belanja dan wisata kuliner. Sejalan dengan ditetapkannya Ciletuh Palabuhanratu menjadi status Unesco Global Geopark (Geopark Internasional) tentu perlu percepatan terhadap komitmen seluruh stakeholder dan target-target capaian yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka pengembangan Geopark di provinsi Jawa Barat, diperlukan tata kelola geopark yang handal dan profesional. Pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta masyarakat harus tertuang dengan jelas dalam kebijakan daerah. Secara khusus bahwa tata kelola kawasan geopark di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kondisi yang belum sinergis dan belum terpadu diantara stakeholder yang ada, baik dari sisi kebijakan maupun operasional kegiatannya. Keberadaan lembaga pengelola yang telah dibentuk di masing-masing kawasan geopark di Jawa Barat belum mampu melaksanakan pengelolaan kawasan geopark handal, profesional dan sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai leading sector dalam upaya

pengembangan Ciletuh melaksanakan kebijakan tersebut, oleh karena penulis ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya pengembangan kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Geopark

Berdasarkan Global Geopark Network (GGN) dan European Geopark Network (EGN) bahwa definisi Geopark adalah wilayah dengan batas yang didefinisikan dengan baik yang terdiri dari wilayah luas yang memungkinkan pembangunan lokal berkelanjutan, baik pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, menurut UNESCO (2006), Geopark adalah wilayah yang dapat didefinisikan sebagai kawasan lindung berskala nasional yang mengandung sejumlah situs warisan geologi penting yang memiliki daya tarik keindahan dan kelangkaan tertentu yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari konsep integrasi konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Berdasarkan beberapa definisi Geopark tersebut, secara singkat Geopark ini merupakan bentuk pemanfaatan ruang kawasan lindung yang juga merupakan sebuah kesempatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Didalam mewujudkan aspirasi Geopark, terdapat tiga pendekatan yang berbeda,

yaitu, pelestarian / konservasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan (Newsome et al., 2012; Farsani et al., 2011).

Menurut Setyadi (2012) secara singkat Geopark ini merupakan bentuk pemanfaatan ruang kawasan lindung yang juga merupakan sebuah kesempatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut Darsiharjo dkk. (2016) Geopark adalah taman bumi yang termasuk dalam kawasan konservasi, yang memiliki unsur geodiversity (keragaman geologi), biodiversity (keragaman hayati, dan cultural diversity (keragaman budaya)) yang di dalamnya memiliki aspek dalam bidang pendidikan sebagai pengetahuan di bidang ilmu kebumihuan pada keunikan dan keragaman warisan bumi dan aspek ekonomi dari peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan sebagai geowisata.

Konsep Pengembangan Pariwisata

Menurut Gamal Suwantoro (2004:3) Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Menurut Cox, 1985 dalam Downling dan Fennel, 2003, 2 (dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta,

2009:81), pengelolaan manajemen pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal (local wisdom) dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Konsep Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Mengutip definisi kebijakan yang diambil dari pendapat Federick dalam buku Agustino menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Leo Agustino, 2008)

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat

dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2008:79)

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: *pertama* yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Model Pentahelix Dalam Pengembangan Geopark Ciletuh.

Pada proses pengembangan Geopark Ciletuh dibutuhkan peran dari para *Stakeholder* untuk membantu pengembangan kawasan Geopark Ciletuh agar dapat berkembang secara optimal. Pengembangan kawasan Geopark Ciletuh dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antar 5 *Stakeholder*, yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Peran para *stakeholder* pada model Penta Helix

dibutuhkan untuk menangani kompleksitas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan Geopark Ciletuh. Pemerintah perlu menyusun strategi agar kawasan Geopark Ciletuh dapat berkembang menjadi kawasan pariwisata yang unggul dan dapat membangun perekonomian Kabupaten Sukabumi. Penta Helix merupakan solusi pengembangan kreativitas, inovasi agar pengembangan Ciletuh dapat bersinergi. Menurut Slamet dkk (2017), Penta Helix memiliki rumus ABCGM yaitu *Academician (LIPI dan UNPAD), Business, Community (Persatuan Alam Pakidulan Sukabumi), Government (Pemerintah Kabupaten Sukabumi), dan Media (Media Visionesia Kreatif Nusantara)*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah Studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan karena banyaknya informasi dan data mengenai Kebijakan Pengembangan Pariwisata Geopark. Hal ini dapat ditelusuri melalui berbagai informasi dalam buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Studi pustaka menjadi penting dalam menganalisa Kebijakan Pengembangan Pariwisata Geopark.

HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan

Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh.

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006 : 141-144)

Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. (Agustino, 2006 : 141-144). Lebih jelasnya mengenai pembahasan implementasi kebijakan pengembangan

kawasan Geopark Ciletuh sebagai berikut :

1.Ukuran/Sasaran dan Tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, dapat dikatakan bahwa tujuan Kebijakan Pengembangan Pengembangan Ciletuh sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Geopark di Jawa Barat dan juga Misi Pembnagunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi yakni Menjadikan Ciletuh sebagai pariwisata unggulan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat, Pengelolaan Geopark dengan mempertahankan fungsi konservasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Geopark Ciletuh serta meningkatnya kunjungan wisatawan ke Geopark Ciletuh. Seperti yang terdapat pada data tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

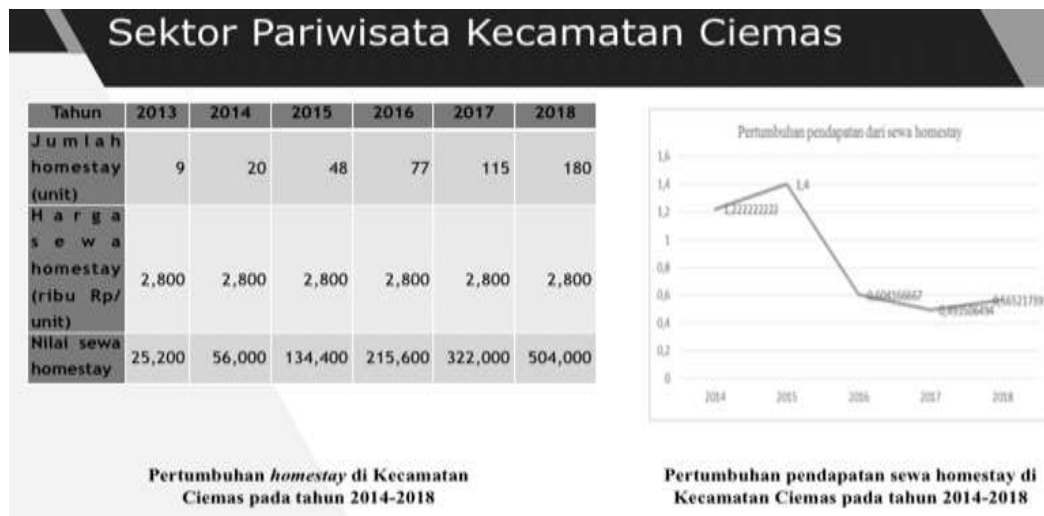
Rekapitulasi Arus Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2019

No	Wisatawan	2018 Triwulan 1-IV	2019 Sampai Triwulan III
I	MANCANEGARA	127.145	94.438
	Menginap	110.549	73.033
	Tidak Menginap	16.596	21.405
II	DOMESTIK	7.719.483	2.862.075
	Menginap	1.512.631	1.825.611
	Tidak Menginap	2.206.852	1.036.464
	Jumlah	3.846.628	2.956.513

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2019

Tabel 4.3

Pertumbuhan jumlah dan pendapatan homestay 2014-2018



(Sumber : LIPI, 2019)

Namun untuk pencapaian tujuan dari kebijakan pengembangan Geopark Ciletuh belum sepenuhnya tercapai, hanya poin peningkatan wisatawan Ciletuh dan pemberdayaan masyarakat., sedangkan pengelolaan Geopark dengan fungsi konservasi belum tercapai, karena pemerintah dan masyarakat baru sebatas pada upaya pengelolaan sampah dan penanaman pohon.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh secara kuantitas sudah mencukupi seperti yang ada dalam Tim Koordinasi Pengembangan Geopark Ciletuh, namun secara kualitas terutama dari unsur masyarakat masih banyak yang tidak peduli dan juga kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terutama dalam upaya konservasi alam. Terkait sumber daya finansial, meskipun terbilang besar

anggaran yang sudah dialokasikan untuk Pengembangan Ciletuh, anggaran tersebut masih dirasa dikurang dan perlu bantuan dari pusat. Terkait sumberdaya infrastruktur, dalam pengembangan Geopark Ciletuh ini sudah dilakukan pembangunan seperti jalan utama akses ke Kawasan Geopark Ciletuh seperti Jalan Trans Loji dari sampai titik inti Geopark Ciletuh Kecamatan Ciemas, Pembangunan Jalan Setapak Kawasan Geosite Cibenda, Pembangunan Jalan dari Gerbang ke View Deck Kawasan Feosite Cibenda Pembangunan Gapura Selamat Datang, Pembangunan marka jalan, Pembangunan Penerangan Jalan, fasilitas penginapan juga fasilitas toilet dan sarana kesehatan.

Namun ketersediaan infrastruktur pun masih belum memadai, misalnya jumlah lampu penerangan dan marka jalan yang masih minim, dan akses jalan ke beberapa objek wisata masih sulit dan belum diperbaiki. Terkait sumber daya waktu, jika dilihat dari

Rencana Induk Pengembangan Geopark Ciletuh 2017-2025, maka target waktu pengembangan Ciletuh selama 8 tahun. Namun dalam Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh sampai Geopark Ciletuh menjadi pariwisata yang berdaya saing Global belum ada batas waktu yang ditetapkan

3. Sikap Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi.

Sikap penerimaan dalam Kebijakan Pengembangan Ciletuh ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tupoksi dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No 72 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Geopark, dimulai dari pertama *Perencanaan*, yang mana pada perencanaan pengembangan kawasan Geopark Ciletuh ini telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Ciletuh 2017-2025, yang didalamnya mengatur kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan Ciletuh mulai dari sosialisasi, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sekitar Ciletuh yang berpedoman pada Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 Tentang Pengembangan Taman Bumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sedang melaksanakan perbaikan/revisi RPJMD 2016-2021 yang nantinya akan mengatur lebih dalam tentang pengembangan Ciletuh. Saat ini hanya rencana program per 1 tahun yang tercantum dalam Master Plan/Rencana

Aksi Daerah dalam Pengembangan Ciletuh, termasuk untuk tahun 2020 sudah dibuat Master Plan Pengembangan Ciletuh.

Kedua sikap pelaksana dalam pengembangan Ciletuh juga ditunjukkan dari penguatan *kelembagaan* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang dimulai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengembangan Ciletuh diantaranya Surat Keputusan Bupati Sukabumi No 556/Kep.735-Ekon 2017 Tentang Tim Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Surat Keputusan Bupati Sukabumi No 556/Kep.144-Dispar 2017 Tim Penataan dan Penertiban Pesisir Pantai Geopark Ciletuh, selain itu juga koordinasi dengan Pemerintah Desa, PAPSII dan masyarakat. Namun dalam hal Pengembangan Ciletuh ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh. Dalam hal penguatan kelembagaan Pemerintah Desa pun mengeluarkan kebijakan yang mendukung dalam hal pelestarian lingkungan, salah satu nya Pemerintah Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Desa Tentang Pelindungan Satwa Liar dan Tumbuhan yang berisi tentang larangan perburuan satwa liar karena pengembangan Ciletuh merupakan pengembangan pariwisata dengan prinsip kelestarian alam dan hayati.

Ketiga sikap pelaksana dalam pengembangan Ciletuh juga sesuai

PERGUB Jawa Barat No 72 Tahun 2012 yaitu adanya **Kolaborasi** dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam hal pengembangan Ciletuh ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kebijakan melakukan kolaborasi baik dengan SKPD lain, Pemerintah Desa, PAPSI, dunia usaha juga masyarakat dalam hal sosialisasi Ciletuh, pembangunan infrastruktur, pelestarian alam dan juga pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pengembangan Ciletuh dan promosi Ciletuh, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan kolaborasi dengan pihak lain seperti dilaksanakannya MoU dengan Gunung Sewu Global Geopark, MoU dengan Geopark Rinjani UGG, MoU dengan Lengkwari GG Malaysia, MoU dengan satuan Geopark Thailand, dan juga dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal kuliner.

Keempat sikap pelaksana dalam hal **pemberdayaan masyarakat**. Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh dalam PERGUB No 72 Tahun 2018 juga disebutkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal pemberdayaan masyarakat yaitu Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas UMKM kemudian PAPSI, Pemerintah Desa dan dunia usaha melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, mulai

dari pelatihan, workshop seperti pembinaan UMKM kerajinan bambu, pengelolaan hasil tani seperti beras merah, pelatihan kerajinan membatik, selain pelatihan pengelolaan juga dilakukan pelatihan pemasaran dan studi banding. Sejauh ini sudah dilakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat kepada 520 rumah tangga, 180 homestay, 451 usaha mikro dan juga 210 pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa agen pelaksana atau implementor dari Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya. Bentuk tindakan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh belum maksimal dalam melakukan kolaborasi dan juga proses sosialisasi kepada masyarakat serta upaya konservasi. Namun, luas cakupan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan agen pelaksana kebijakannya

5. Komunikasi Antar Organisasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, terlihat bahwa koordinasi agen pelaksana Kebijakan Pengembangan Ciletuh masih kurang maksimal. Koordinasi di tingkat Pemerintah (antar

SKPD) sudah baik, namun koordinasi antara Pelaku Dunia Usaha dan masyarakat belum maksimal. Padahal, kebijakan ini sifatnya koordinatif, jadi koordinasi menjadi hal yang amat sangat vital dalam pelaksanaannya, selain itu juga kebijakan ini mengedepankan kolaborasi yang mana bukan hanya kolaborasi antar SKPD saja, tetapi juga kolaborasi dunia usaha juga masyarakat. Kendati pun sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dengan rapat evaluasi secara rutin setiap tri wulan dengan SKPD serta jaringan komunikasi yang dibangun oleh stakeholder sudah cukup baik melalui FGD, namun ada beberapa agen pelaksana yang belum benar-benar paham akan tugas dan fungsinya sehingga kerjasama yang baik sulit terjalin.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi

Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil penelitian, jika dilihat dari *lingkungan ekonomi* dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh secara umum sudah cukup baik. Tingkat ekonomi masyarakat utamanya masyarakat sekitar Ciletuh yang semakin baik, dilihat dari meningkatnya penghasilan masyarakat, juga masyarakat yang semula menganggur mereka bisa bekerja dengan berdagang, membuka usaha homestay, pemandu wisata, selain itu memanfaatkan hasil tani yang diolah menjadi oleh-oleh khas ciletuh. Taraf ekonomi masyarakat yang bertambah penghasilannya, menjadikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.6

Kondisi Ekonomi Kawasan Ciletuh

No	Kecamatan	Sumber penghasilan utama	Komoditas pertanian utama
1	Cisolok	Pertanian	Padi, perikanan tangkap dan kehutanan
2	Cikakak	Pertanian	Padi
3	Palabuhanratu	Perikanan	Perikanan tangkap
4	Simpitan	Pertanian, perikanan	Padi dan ikan laut
5	Ciomas	Pertanian	Padi
6	Waluran	Pertanian	Padi
7	Ciracap	Pertanian	Padi
8	Surade	Pertanian	Padi

Sumber : LIPI, 2019

Kemudian untuk *kondisi sosial lingkungan*, Kawasan Geopark Ciletuh merupakan daerah yang terletak jauh dari pusat kota, yang tentunya masih

kental akan budaya kearifan lokalnya, dengan adanya kebijakan pengembangan geopark Ciletuh tentunya daerah Ciletuh akan semakin

dikenal luas oleh masyarakat, modernisasi akan masuk kedalam masyarakat Ciletuh sendiri, ini akan merubah pola hidup masyarakat, maka kebijakan pengembangan Ciletuh ini sangat diperlukan adanya dukungan dari masyarakat yang mana masyarakat mau menerima perubahan ini.

Dalam hal kebijakan pengembangan Ciletuh ini, mayoritas masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan pengembangan ini, tidak ada penolakan yang keras dari masyarakat setempat. Namun masih ada sedikit kekhawatiran dari masyarakat akan membawa dampak negatif seperti merusak budaya kearifan lokal misalnya pengaruh gaya hidup bebas atau wisatawan yang merusak lingkungan.

Selain kondisi sosial dan ekonomi, *kondisi lingkungan politik* juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari dukungan elit politik, implementasi Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh cenderung mendapatkan dukungan yang baik. Komitmen Bupati Sukabumi dalam kebijakan pengembangan Ciletuh ini sangat mendukung, dan memiliki komitmen yang besar, selain memasukkan ke dalam program prioritas pembangunan, Bupati Sukabumi dan juga DPRD Kabupaten Sukabumi sedang mendorong untuk dikeluarkannya Peraturan Daerah yang khusus akan mengatur tentang Pengembangan Geopark Ciletuh. Karena saat ini belum ada Peraturan

Daerah Kabupaten Sukabumi yang khusus mengatur tentang itu. Hal ini tentunya berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh.

Geopark Ciletuh ditetapkan oleh UNESCO sebagai International Geopark, hal tersebut dapat menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung, oleh karena itu pemerintah daerah melakukan pengembangan wisata daerah ciletuh dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Salah satunya kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata Geopark Ciletuh, kolaborasi antara *stakeholder* dalam upaya mengembangkan objek wisata geopark Ciletuh yang menunjukkan arah dalam kelembagaan yang dirancang di mana peran pemangku kepentingan tidak saling mengganggu. Dimensi proses kolaborasi ditemukan hasil 4 capaian dan rencana kerja target untuk pengembangan geopark Ciletuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan *Geopark* (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata *Geopark* Ciletuh tahun 2019) yang dipengaruhi oleh variabel/dimensi seperti yang dikemukakan oleh Van Metter Van

Horn, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut yaitu :

1. Dimensi *sasaran dan tujuan kebijakan*, dapat dikatakan bahwa tujuan Kebijakan Pengembangan Pengembangan Ciletuh belum sepenuhnya tercapai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Geopark di Jawa Barat.
2. Dimensi *Sumber Daya*, dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Geopark Ciletuh masih belum mencukupi baik dari kualitas sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya anggaran dan juga sumber daya waktu.
3. Dimensi *Disposisi/sikap para pelaksana* yaitu pelaksana Kebijakan Pengembangan Pengembangan Geopark Ciletuh ini secara umum memiliki sikap penerimaan pada kebijakan tersebut, mulai dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, PAPSU, dunia usaha dan juga masyarakat dilihat dari telah dilaksanakannya tugas sesuai dengan PERGUB No 72 Tahun 2018 .
4. Dimensi *Karakteristik Agen Pelaksana*, agen pelaksana atau implementor dari Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya. Berdasarkan uraian pada dimensi karakteristik agen pelaksana tersebut di atas, bentuk tindakan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh belum maksimal dalam melakukan kolaborasi dan juga proses sosialisasi kepada masyarakat
5. Dimensi *komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana*, terlihat bahwa koordinasi agen pelaksana Kebijakan Pengembangan Ciletuh belum terjalin secara intensif.
6. Dimensi *Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik* bahwa lingkungan ekonomi secara umum mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh, Lingkungan ekonomi yang mendukung sehingga mendorong perekonomian warga sekitar Ciletuh, Sementara untuk lingkungan sosial di sekitar Ciletuh sangat mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Geopark Ciletuh meskipun ada sedikit kekhawatiran membawa pengaruh negatif, Lingkungan Politik juga sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini ditunjukkan dengan dimasukkannya pengembangan Ciletuh dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Syukur. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI

- Agustino, Leo, (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anindhita, Setyadi.(2012). *Studi Komparasi Pengelolaan Geopark di Dunia Untuk Pengembangan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karang Sambung*. Semarang : Biro Penerbit Planologi UNDIP.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Desain Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar
- Hill, Michael dan Peter Hupe. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publication
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. (1986). *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press
- I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta : UI Press
- Islamy, Irfan, M. (2006). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J.(2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya:Bandung.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PAN
- Nazir, M. (2003) *Metode Penelitian*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi*,

- Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy.* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, (2012). *Public Policy.* Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pendit, S. Nyoman. (1999). *Ilmu Pariwisata.* Jakarta : Pradya Pramita
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sutopo,HB.(2002). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal 35
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Sosial Agama.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi.(2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep,strategi dan Kasus).* Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.
- Darsiharjo, Upi, Ilham. (2016).*Pengembangan Geopark Ciletuh Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi.* Universitas Pendidikan Indonesia :Jurnal Manajemen Resort & Leisure
- Khairil&Yuhanis. (2010). *Tourism Policy Development: A Malaysian Experience Tourism Policy Development: A Malaysian Experience.* Universiti Putra Malaysia :Reasearch Gate
- Mastura Jaafar, Aleff Omar Shah Nordin, Shardy Abdullah

- &Azizan Marzuki. (2014). *Geopark Ecotourism Product Development: A Study on Tourist Differences*. Canadian Center of Science and Education
- Pedrana, Margherita. (2013). *Local Economic Development Policies And Tourism. An Approach To Sustainability And Culture*. European University of Rome : Regional Science Inquiry Journal
- Tawonezvi Charleen, Mirimi Kumbirai, Kabote Forbes. (2014). *Collaboration And Stakeholder Involvement For Tourism Development In Zimbabwe*. International Journal Of Advanced Research In Management And Social Sciences
- Laporan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Aktualisasi Pengembangan Geopark Ciletuh, 2018.
- Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
- “Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark - Kompas.com”(https://regional.kompas.com/read/2018/04/16/13301341/geopark-ciletuh-palabuhanratu-ditetapkan-sebagai-unesco-global-geopark)
- “Pengelolaan Geopark di Indonesia Masih Terkotak-kotak” (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160925/12/586833/pengelolaan-geopark-di-indonesia-masih-terkotak-kotak>)
- “Musrenbang Jabar, Sukabumi Akan Lakukan Kolaborasi | Portal Resmi Pemda Kabupaten Sukabumi” (<https://Sukabumikab.Go.Id/Portal/Berita-Daerah/1967/Musrenbang-Jabar-Sukabumi-Akan-Lakukan-Kolaborasi.Html>)
- “Pengembangan Geopark Ciletuh – Pelabuhan Ratu, Pemkab Sukabumi Akan Revisi RTRW-TribunJabar” (<https://Jabar.Tribunnews.Com/2018/11/08/Pengembangan-Geopark-Ciletuh-Pelabuhan-Ratu-Pemkab-Sukabumi-Akan-Revisi-Rtrw>)
- “Gubernur Jabar Apresiasi Karya Inovatif Sekda Sukabumi Dalam Mengembangkan Kawasan Geopark Ciletuh Menuju Pariwisata Berkelas Dunia – Berantas Online” (<https://Www.Berantasonline.Com/Gubernur-Jabar-Apresiasi-Karya-Inovatif-Sekda-Sukabumi->

Dalam-Mengembangkan-
Kawasan-Geopark-Ciletuh-
Menuju-Pariwisata-Berkelas-
Dunia/)

“Luhut Binsar Panjaitan: Sinkronisasi
Aturan Perlu Dilakukan Untuk
Pengembangan Geopark. –
Ciletuh
Palabuhanratu”(Http://Ciletuhp
alabuhanratugeopark.Org/Luhut
-Binsar-Panjaitan-Sinkronisasi-
Aturan-Perlu-Dilakukan-Untuk-
Pengembangan-Geopark/)